

**PERAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(STUDI DI KELURAHAN SAMAAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH :

FRIDOLAN YASIN

Nim: 2016210062

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2020

RINGKASAN

Adanya infrastruktur yang layak adalah salah kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar sehingga dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu elemen yang berperan adalah kelompok masyarakat (POKMAS) dimana keterlibatan kelompok masyarakat (POKMAS) merupakan hal yang vital dan penting dimana keberadaan mereka adalah guna untuk menampung setiap aspirasi dan keluhan yang diderita atau didapat dari setiap kelompok masyarakat atau masyarakat sekitar. Oleh sebab itu kelompok masyarakat (POKMAS) yang merupakan sebuah wadah aspirasi, pikiran dan tujuan yang tertampung dan terangkum melalui kebebasan berbicara, berkumpul dan mengemukakan pikiran, didalam sebuah forum dan akan diimplementasikan dalam kerja nyata melalui kerjasama kelompok masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Kata kunci: kelompok masyarakat (POKMAS), perencanaan pembangunan, infastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia terpisah dalam wilayah regional, terpisah dalam wilayah yang lebih kecil yaitu Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Daerah-daerah diatas tidak dapat dipisahkan dari Negara republic Indonesia. Oleh kerena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia supaya terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.dapat di simpulkan bahwa pembangunan adalah upaya penyalarsan agar terciptannya pilihan yang lebih luas secara tepat kepada setiap warga negara untuk menjalankan dan mendapatkan harapan yang paling humanis (Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004).

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan yang seutuhnya berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah proses penumbuhan rasa kemanusiaan atau kenaikan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupnya baik secara jasmani dan rohani. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil perlu adanya perencanaan pembangunan yang terencana. Perencanaan pembangunan iyalah salah satu cara pembuatan pilihan-pilhan atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas (Riyadi dan Bratakusumah dalam Muhammad 2017: 3)

Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang ideal, maka dibutuhkan tahapan-tahapan, sebagaimana yang telah terdefinisikan didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyakan

bahwa prosesnya terbagi atas penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksana rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan daerah seharusnya menggambarkan kebutuhan nyata dari suatu wilayah.

Salah satu yang merupakan kebutuhan masyarakat adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat mendukung aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut grigg (dalam Qoroni 2005) infastruktur merupakan penyediaan sarana berupa, drainase, transportasi, bangunan-bangunan dan alat-alat umum yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sehingga dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur perlu adanya keterlibatan elemen masyarakat sehingga dapat menghasilkan produk pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat, karena yang merasakan dampak dari adanya suatu pembangunan adalah masyarakat itu sendiri.

Pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan dalam suatu wilayah terkesan menjadi tanggungjawab pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjadi objek dari pembangunan. Yang diinginkan ialah peran dari masyarakat dalam implementasi pembangunan, mengingat hasil dari pembangunan kenyataanya untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat lebih memilih untuk mengandalkan pemerintah dalam aktualisasi dari suatu pembangunan, sehingga kendatipun sudah mendesak dari produk hasil suatu pembangunan, selalu menunggu action dari pemerintah. prilaku ketergantungan tersebut lebih jelas pada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, dimana kebanyakan masyarakat lebih baik menunggu *action* dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya infrastruktur.

Salah satu elemen yang berperan adalah kelompok masyarakat (POKMAS) dimana keterlibatan kelompok masyarakat (POKMAS) salah satu yang dibutuhkan dan sangat vital dan penting dimana kehadiran dari POKMAS ialah guna untuk menampung setiap aspirasi dan

keluhan yang diderita atau didapat dari setiap kelompok masyarakat atau masyarakat sekitar. Oleh sebab itu kelompok masyarakat (POKMAS) merupakan sebuah media penyampaian harapan, pikiran dan tujuan yang tertampung dan terangkum melalui kebebasan berpendapat, berkumpul dan mendiskusikan pikiran, didalam sebuah forum dan akan dilaksanakan dalam aksi nyata lewat kerjasama dengan kelompok masyarakat. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur (Studi DiKelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang)**

1.1.Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat menemukan permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kelompok masyarakat (POKMAS) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ?
2. Apa Kendala yang dihadapi oleh kelompok masyarakat (POKMAS)dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ?

1.3 Tujuan

Berawal dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauhmana peran kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh peran kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

1.4.Manfaat

Hasil yang akan diraih pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian yang akan dilakukan dapat dijadikan petunjuk studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan fisik maupun pembangunan kualitas manusia di suatu kelurahan.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah kelurahan dan juga kelompok masyarakat dalam usaha meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan infastruktur

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fauzi Nur Febry 2018, *partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di desa widodomartani ngemplak sleman yogyakarta*, skripsi : universitas islam negeri kalijaga, yogyakarta
- Maulana Indra 2013, *partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan realisasi usulannya di kota surakarta*, skripsi: universitas sebelas maret surakarta
- Moleong, Lexy J.2009.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Mukmin, 2017, *perencanaan pembangunan*, makasar, cv. Dua bersaudara
- Nugroho, Rochim, 2004, *Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarjiyanto. 2017. Peran Kelompok Masyarakat (Kube Lumbung Sinergi) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Bulakan Sukoharjo Jawa Tengah, *JIEP-Vol. 17, No 1 Maret 2017*
- Sjafrizal.2015. *perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta Penerbit PT Raja Grafindo Persada:
- Soekanto soerjono, 2013, *sosiologi suatu pengantar*, jakarta, raja grafindo persada
- Suharto. 2014. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung Penerbit PT Refika Aditama.
- Sugiyono.2014.*Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Solekhan Moch, 2014, *penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat*, Malang, Stara Pers

Sururi Ahmad Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, jurnal

Pahmi Khaidir. 2017. Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, *Universitas Medan Area*

Qoroni Uwes Akhmad. 2005 Efektivitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Di Kabupaten Tegal. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang

Tri Harsetio Doni. 2017 Hubungan Peranan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (Gsmk) Di Kabupaten Tulang Bawang, Skripsi: *Universitas Lampung*

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Indonesia.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional